Katalog: 4102004.8202

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2016

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2016

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Halmahera Tengah 2016

ISBN : 978-602-662-103-0
No. Publikasi : 82020.1721
Katalog : 4102004.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 39

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:
Ikon kesejahteraan rakyat

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :
CV. Tara Taro

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016

Pengarah:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:
Muhammad Arif Fakhrudin, SST

Penulis:
Luthfan Eka Putra, SST

Pengolah Data:
Luthfan Eka Putra, SST

Desain:
Luthfan Eka Putra, SST

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Tengah 2016 merupakan publikasi yang baru diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah. Publikasi ini berisi tentang data dan informasi terkait kesejahteraan rakyat. Publikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna data dalam memahami keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat khususnya Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, aspek-aspek yang dikaji hanya dibatasi pada aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Akhirnya, banyak pihak telah berkontribusi bagi terbitnya publikasi ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Weda, Oktober 2017

Kepala BPS

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST., M.Si.

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR TABEL

halaman

DAFTAR GAMBAR

halaman

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3
L	Perempuan
L+P	Laki-laki + Perempuan
MI	Madrasah Ibtidaiyah
P	Perempuan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Ruta	Rumah tangga
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Wajar	Wajib Belajar

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	–
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	^{e}
Angka sementara	:	^{x}
Angka sangat sementara	:	^{xx}
Angka diperbaiki	:	^{r}

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = 1/6,2898 m^3
hektar (ha)	: 10 000 m^2
kilometer (km)	: 1 000 meter
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt *hour*
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%). Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1
KEPENDUDUKAN
Usia Produktif
36,61%
0 - 14 Tahun
60,56%
15 - 64 Tahun
2,83%
65 Tahun+
65,13
ANGKA BEBAN
KETERGANTUNGAN
2016
Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk 15-64 tahun (usia produktif).
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah aspek penting dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sebuah keuntungan namun dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika tidak memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, jika pemerintah ingin pembangunan berjalan dengan baik maka selain perlu upaya pengendalian jumlah penduduk, juga perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten	Tahun		
	2010	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Tengah	42 980	49 807	51 315
Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun			
2010-2016		1,85	
2015-2016		1,79	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Halmahera Tengah dari tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Halmahera Tengah mencapai 42.980 jiwa dan meningkat menjadi 49.807 jiwa pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah penduduk Halmahera Tengah meningkat menjadi 51.315 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan masalah kependudukan yang serius jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan dengan program pembangunan.

Pada tabel 1, dapat diketahui rata-rata laju pertumbuhan penduduk Halmahera Tengah pada periode 2010 – 2016 mencapai 1,85 persen per tahun. Sementara pada periode 2015 – 2016, laju pertumbuhannya sebesar 1,79 persen per tahun lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan per tahun pada periode 2010 – 2015. Hal ini berarti terjadi perlambatan pertumbuhan jumlah penduduk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan nilai laju pertumbuhan penduduk tersebut pemerintah tidak boleh merasa puas tetapi harus terus meningkatkan program pengendalian penduduk. Program-program lainnya seperti penambahan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan pangan dan papan juga sangat penting untuk memberikan pelayanan prima bagi penduduk.

Komposisi dan Kepadatan Penduduk

Komposisi penduduk merupakan hal penting dalam pertimbangan pembangunan supaya pembangunan lebih tepat sasaran. Dalam pembangunan, perlu melihat suatu kelompok yang perlu diprioritaskan dibanding yang lain. Hal ini dikarenakan daerah memiliki komposisi penduduk yang berbeda.

Berdasarkan tabel 2 di bawah ini, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki persentase penduduk usia 0 – 14 tahun yang cukup tinggi. Penduduk dengan rentang usia ini membutuhkan pendidikan dasar yang baik supaya dapat tercipta generasi atau SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Penduduk dengan usia 20 – 49 tahun juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu sekitar 41,21 persen. Usia ini merupakan usia subur bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah juga perlu memperhatikan hal ini. Jika tidak, maka dapat terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin, 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	11,22	9,67	10,47
5 - 9	12,13	13,32	12,71
10 - 14	12,86	14,03	13,43
15 - 19	9,11	8,46	8,79
20 - 24	5,32	6,01	5,66
25 - 29	7,66	7,70	7,68
30 - 34	9,09	7,59	8,36
35 - 39	7,91	9,79	8,82
40 - 44	5,49	5,69	5,59
45 - 49	6,02	4,13	5,10
50 - 54	3,38	4,21	3,79
55 - 59	4,36	4,13	4,25
60 - 64	2,91	2,14	2,53
65 - 69	1,09	1,16	1,13
70 - 74	0,85	0,79	0,82
75 +	0,59	1,18	0,88
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Maret 2016

Aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari *sex ratio*. Pada tabel 3, *sex ratio* Halmahera Tengah adalah sebesar 105, artinya dari 100 penduduk perempuan ada 105 penduduk laki-laki. Jadi, disini penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Tabel 3. *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Kabupaten Halmahera Tengah	2016
(1)	(2)
Sex Ratio	105
Kepadatan	22

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Halmahera Tengah merupakan kabupaten di Pulau Halmahera dengan luas daratan sekitar 2.276,83 km^2 atau sekitar 27 persen dari luas wilayah keseluruhan. Pada tabel 3, kepadatan penduduk halmahera Tengah yaitu sebesar 22,54 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah per km^2. Sehingga arti dari angka 22 yaitu setiap satu kilometer persegi wilayah daratan Halmahera Tengah dihuni oleh sekitar 22 penduduk.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (non produktif) dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (produktif). Makin besar Angka Beban Ketergantungan maka semakin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Sebaliknya, semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Gambar 1. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015 - 2016
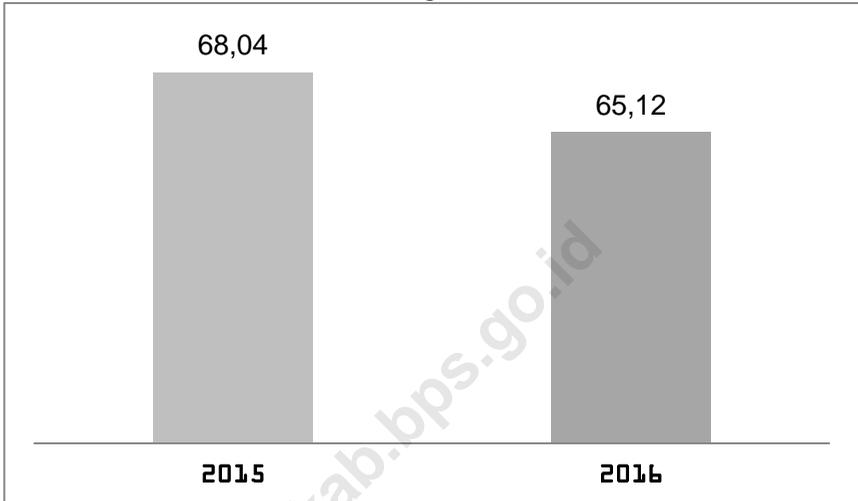
Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan gambar 1, angka beban ketergantungan di Halmahera Tengah pada periode 2015 - 2016 mengalami penurunan yang landai. Hal ini berarti selama periode tersebut capaian keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan bisa dikatakan cenderung meningkat. Pada tahun 2016, angka beban ketergantungan berkisar 65,12, berarti setiap 100 penduduk usia produktif secara ekonomi harus menanggung beban sekitar 65 sampai 66 penduduk yang tidak produktif secara ekonomi. Ini mengindikasikan terjadi peningkatan jumlah penduduk produktif pada tahun 2016.

Pada tabel 4 dapat dilihat proporsi penduduk muda pada tahun 2016 adalah sebesar 36,61 persen dan penduduk usia tua berkisar 2,83 persen. Proporsi penduduk untuk usia produktif (14 – 64 tahun) yaitu 60,56 persen dari total penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka persentase penduduk produktif laki-laki yaitu 61,25 persen lebih besar dibanding persentase penduduk produktif perempuan yaitu 59,84 persen.

Tabel 4. Persentase Penduduk menurut kelompok umur produktif dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	36,22	37,03	36,61
15-64	61,25	59,84	60,56
65+	2,53	3,13	2,83
Dependency Ratio	63,26	67,11	65,12
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas

Komposisi penduduk seperti di atas mengindikasikan bahwa jumlah penduduk produktif memang memiliki beban yang cenderung kecil untuk menanggung penduduk usia non produktif. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi penduduk produktif maka beban yang ditanggung akan semakin kecil. Namun di sisi yang lain, hal ini juga dapat menjadi masalah tersendiri jika besarnya proporsi penduduk yang produktif tersebut tidak diimbangi oleh lapangan usaha yang tersedia. Banyak penduduk produktif yang tidak mendapat pekerjaan sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah dalam mencegah masalah tersebut dengan mempersiapkan lapangan usaha bagi penduduk produktif, ataupun melakukan penyuluhan kepada penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk dalam berwirausaha.

Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).

Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

PENDIDIKAN

Pendidikan memiliki peran penting terhadap kualitas penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduknya. Di sisi lain, pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Semakin baik pendidikan maka semakin baik kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, perlu kesadaran baik bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun penduduk yang merupakan aset pembangunan dalam meningkatkan tingkat pendidikan.

Data-data tentang pendidikan sangat diperlukan dalam menentukan arah program pembangunan di bidang pendidikan sehingga tepat sasaran. Pencapaian program pembangunan pendidikan bisa diukur melalui beberapa indikator. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat hasil pembangunan pendidikan khususnya di Halmahera Tengah antara lain Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf adalah indikator yang paling sederhana dalam menggambarkan kemajuan pendidikan suatu wilayah. Indikator ini juga mampu memperlihatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Semakin besar angka melek huruf penduduk dewasa berarti semakin banyak penduduk yang mampu membaca dan menulis. Angka melek huruf yang akan dibahas adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Gambar 2. Angka Melek Huruf di Kabupaten
Halmahera Tengah, 2015-2016
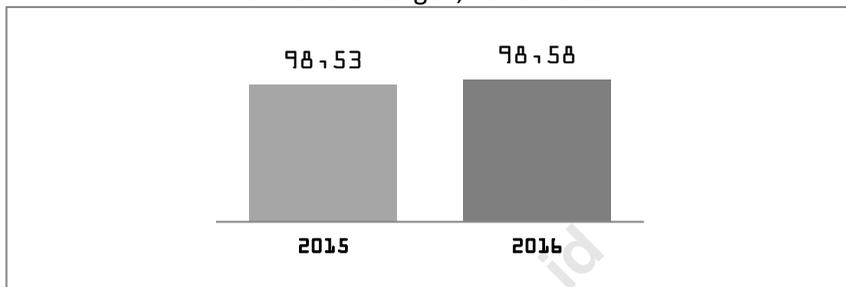
Sumber: BPS, Susenas

Pada gambar 2, angka melek huruf di Halmahera Tengah mengalami peningkatan, yaitu dari 98,53 persen pada 2015 menjadi 98,58 persen pada 2016. Meskipun tak jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang mampu membaca dan menulis di Halmahera Tengah semakin bertambah. AMH sebesar 98,58 adalah angka yang cukup tinggi, namun pemerintah tidak boleh berbangga hati dan harus tetap meningkatkan program-program pendidikan agar tercipta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk Halmahera Tengah.

Angka Pertisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan upaya meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan. APS dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkaitan dengan salah satu target yang ingin dicapai oleh negara-negara berkembang yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) bahwa 100 persen penduduk usia SD dan SMP dapat menyelesaikan pendidikannya pada 2015.

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015-2016

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12 tahun	99,16	98,04	100,00	99,50	99,57	98,78
13 – 15 tahun	95,40	100,00	95,66	100,00	95,53	100,00
16 – 18 tahun	80,71	61,14	85,32	71,52	83,36	65,65

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan tabel 5, pada 2016 sekitar 98,78 persen penduduk usia 7-12 tahun di Halmahera Tengah aktif mengenyam pendidikan. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 99,57 persen. pada tahun 2015, penduduk usia 13-15 tahun yang aktif mengenyam pendidikan sebesar 95,53 persen dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun, turun dari 83,36 persen pada tahun 2015 menjadi 65,65. Penurunan APS usia 7 – 12 tahun dan 16 – 18 tahun menunjukkan tingginya penduduk yang tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena jika terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi kualitas SDM di Halmahera Tengah.

Secara umum, APS laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan terutama bagi penduduk laki-laki. Selain itu, sebagian penduduk laki-laki lebih memilih bekerja dibanding harus melanjutkan pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun. APM digunakan untuk melihat proporsi penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM sebesar 100 persen artinya semua anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015-2016

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	98,40	95,89	100,00	97,88	99,17	96,90
SMP	68,83	80,63	55,83	80,81	62,30	80,73
SMA	55,30	54,56	79,67	71,52	69,31	61,93

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan tabel di atas, semakin tinggi jenjang pendidikan maka APM semakin rendah. Ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak penduduk yang tidak sesuai antara umur dan jenjang pendidikannya. Hal ini juga mengindikasikan kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih merata.

3
KESEHATAN
DAN GIZI
52,00%
Laki-laki &
Perempuan
49,32%
Perempuan
54,20%
Laki-laki
DPT-HB O
Persentase Balita
yang Mendapatkan
Imunisasi Lengkap
2016
(BCG, DPT, Polio, Hepatitis B, Campak)
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

KESEHATAN DAN GIZI

Kondisi kesehatan dan gizi merupakan bagian penting dari kesejahteraan rakyat. Kesehatan dan gizi juga merupakan aspek penting bagi penduduk dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Semakin baik kondisi kesehatan dan gizi penduduk dapat meningkatkan kualitas dan potensi ekonomi penduduk. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang tinggi jika tidak dibarengi dengan kesehatan penduduknya.

Banyak indikator yang dapat digunakan dalam mengukur derajat kesehatan dan gizi penduduk. Namun, indikator yang digunakan yaitu Status Kesehatan Penduduk, Pemberian ASI dan Imunisasi, serta Fasilitas Kesehatan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data,

Status Kesehatan Penduduk

Gambar 3. Angka Kesakitan Kabupaten Halmahera Tengah, 2015-2016
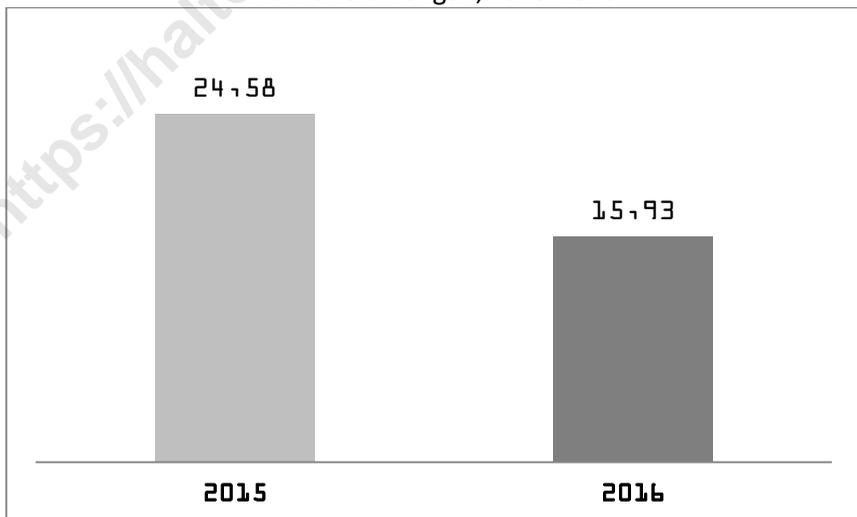
Sumber: BPS, Susenas

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Referensi waktu yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan yang lalu. Gambar 3 menyajikan angka kesakitan penduduk selama 2015-2016. Pada 2015, angka kesakitan penduduk Halmahera Tengah mencapai 24,58 persen, dan turun menjadi 15,93 persen pada 2016. Ini berarti penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan aktivitasnya terganggu mencapai 15,93 persen pada 2016.

Tabel 7. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015-2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	57,63	63,10	60,44
2016	59,64	53,91	56,57

Sumber: BPS, Susenas

Peningkatan status kesehatan penduduk dapat juga dilihat dari jenis pengobatan yang dilakukan. Penduduk yang berobat jalan menunjukkan lebih perhatian dengan kesehatannya. Pada tahun 2016, terjadi penurunan persentase penduduk yang berobat jalan dari 60,44 persen pada tahun 2015 menjadi 56,57 persen. Penurunan juga terjadi pada penduduk perempuan dalam berobat jalan menjadi 53,91 persen. Berbeda halnya dengan penduduk laki-laki yang meningkat persentasenya dalam berobat jalan yaitu menjadi 59,64 persen. Namun secara umum, persentase penduduk yang berobat jalan di Halmahera Tengah masih rendah karena merasa tidak perlu, tidak punya biaya untuk berobat, dan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan.

Pemberian ASI dan Imunisasi

ASI merupakan zat makanan yang paling ideal bagi pertumbuhan bayi. ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi dalam jumlah yang cukup, zat pembentukan, dan zat kekebalan tubuh. Oleh karena itu,

semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya.

Gambar 4. Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi ASI menurut Jenis Kelamin, 2015 - 2016

89,79
86,43
85,68
82,62
82,94
80,83
2015
2016
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki dan Perempuan
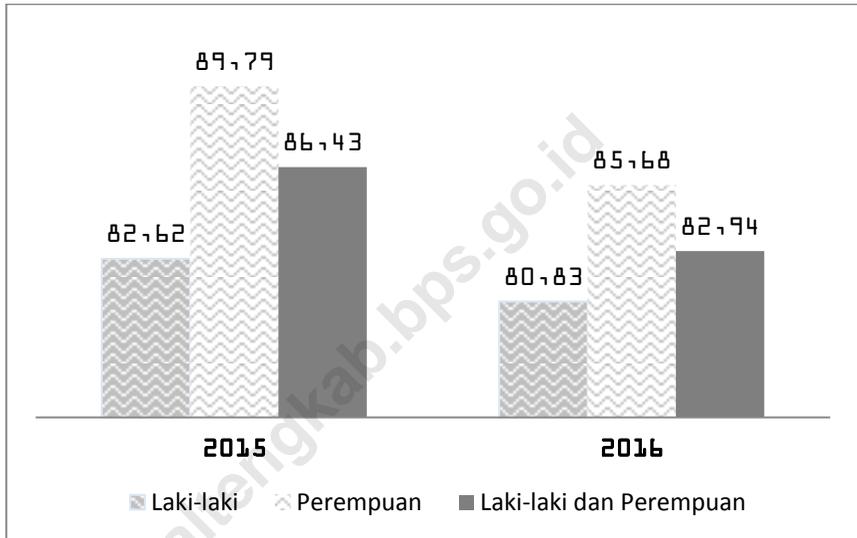
Sumber: BPS, Susenas

Pada tahun 2016, anak usia kurang dari 2 Tahun yang masih diberi ASI sebesar 82,94 persen. Angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 86,43 persen. Berkurangnya angka ini, mengindikasikan bahwa ibu masih belum menyadari akan pentingnya ASI bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi.

Tabel 8. Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015 – 2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	11,44	8,74	10,27
2016	8,84	9,11	8,98

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan anjuran kesehatan, balita seharusnya diberi ASI selama 24 bulan (2 tahun). Namun, Rata-rata lama pemberian ASI bagi balita di Halmahera Tengah masih jauh dari harapan, bahkan pada periode 2015 - 2016 mengalami penurunan, dari 10,27 bulan pada 2015 menjadi 8,98 bulan pada 2016. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI bagi balita dengan harapan setiap balita di Halmahera Tengah bisa mendapatkan ASI sesuai anjuran kesehatan.

Selain kebutuhan ASI, balita juga memerlukan kekebalan buatan yang diperoleh melalui imunisasi karena kekebalan tubuhnya masih sangat rentan. Imunisasi bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pada umur satu tahun, bayi semestinya telah diimunisasi secara lengkap, yaitu satu kali BCG dan campak, tiga kali DPT dan polio.

Gambar 5. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin, 2016

	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	54,20	49,32	52,00
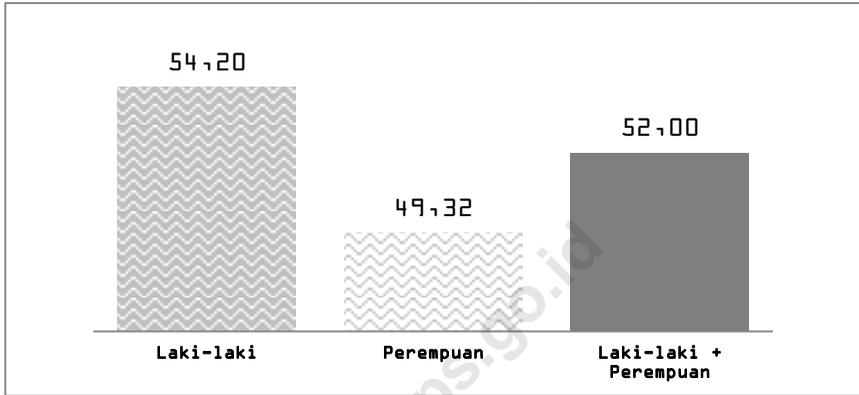
Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan gambar 5, Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap hanya 52 persen dari seluruh balita di Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini menunjukkan masih sangat kurangnya kesadaran penduduk dalam memberikan imunisasi lengkap kepada balita. Sedangkan balita laki-laki mendapat imunisasi lengkap yang lebih baik yaitu 54,20 persen, dibanding balita wanita yang hanya 49,32 persen.

Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Namun ketersediaan dan kualitasnya dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini. Pada tabel 9, disajikan perkembangan beberapa fasilitas kesehatan di Halmahera Tengah 2015-2016.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2015-2016

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	1	0	11	63	0	3
2016	1	0	9	67	0	6

Sumber: Daerah dalam Angka Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan jumlah puskesmas pada tahun 2016 menjadi 9 unit. Pada setiap kecamatan sudah memiliki Puskesmas, kecuali Kecamatan Patani Timur yang hanya memiliki Polindes. Meskipun ada penambahan unit Polindes menjadi 6 unit di Kecamatan Patani Timur pada tahun 2016, tetap diperlukan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lengkap. Selain peningkatan fasilitas kesehatan, tidak kalah penting adalah tersedianya tenaga medis khususnya penolong persalinan yang memadai baik jumlah, keahlian, maupun keterjangkauannya. Selain faktor sarana dan prasarana di atas, kemudahan akses transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan tersebut sangat diperlukan.

4
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
Sumber
Penerangan Utama
Rumah Tangga
2016
69,80%
PLN
20,52%
Non PLN
9,68% Rumah tangga
sumber penerangan utamanya
Bukan Listrik
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016
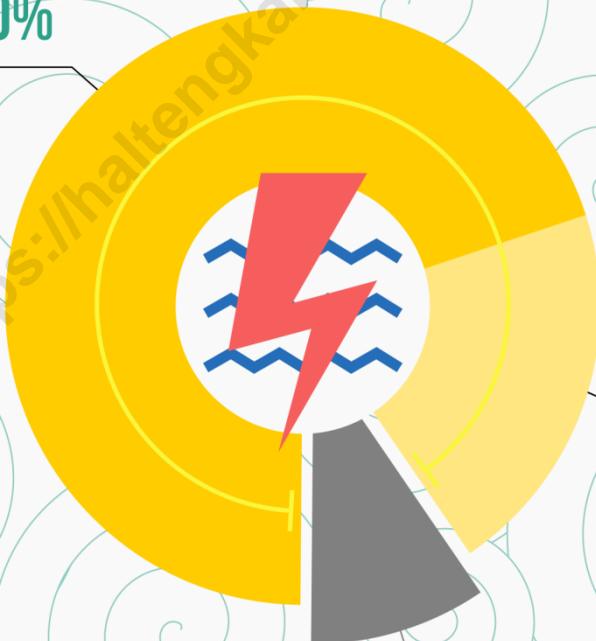
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan merupakan kebutuhan primer manusia untuk memiliki tempat tinggal. Selain untuk tempat tinggal dan berlindung, perumahan dan lingkungannya juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk ditentukan oleh keadaan fisik rumah yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut dapat dilihat dari jenis lantai terluas, jenis atap, jenis dinding, sumber air minum, dan sanitasi.

Kualitas Perumahan

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, dan luas lantai hunian. Kualitas Perumahan dikategorikan layak huni jika memenuhi kriteria tersebut. Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, maka dikategorikan sebagai tak layak huni.

Tabel 10. Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Indikator Kualitas Perumahan	2016
(1)	(2)
Lantai Bukan Tanah	90,51
Atap Layak[1)]	97,69
Dinding tembok	54,26
Luas Lantai per kapita ≥ 10 m^2	76,80

[1)] Atap beton, genteng, seng, dan asbes
Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan data Susenas 2016, karakteristik kualitas perumahan di Halmahera Tengah menunjukkan bahwa 90,51 persen lantai

perumahan bukan tanah atau 9,49 persen perumahan masih berlantai tanah. Rumah tangga dengan jenis lantai tanah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang kurang baik dibanding rumah tangga yang berlantai bukan tanah. Lantai tanah juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan rumah tangga karena lantai tanah menjadi media yang mudah bagi penularan penyakit tertentu seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. Untuk atap, 97,69 persen perumahan sudah memiliki atap yang layak. Atap layak yang dimaksud adalah atap yang terbuat dari beton, genteng, seng, dan asbes karena dinilai lebih tahan dalam memberikan perlindungan terhadap panas dan hujan. Sedangkan untuk dinding, masih 54,26 persen yang berdinding tembok sedangkan sisanya masih menggunakan dinding kayu, bambu, plesteran kayu/bambu, anyaman bambu, atau lainnya. Hal ini menunjukkan kesejahteraan yang masih kurang karena sebagian besar rumah penduduk belum berdinding secara permanen. Indikator kualitas perumahan yang lain yaitu luas hunian. Luas hunian erat hubungannya dengan kepadatan suatu rumah tangga yang dapat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan rumah tangga. Semakin padat luas hunian maka semakin mudah penularan penyakit dalam rumah tangga tersebut. Dalam menentukan luas hunian yang layak, BPS menggunakan ukuran luas lantai perkapita lebih dari 10 m^2. Pada tabel x terlihat bahwa masih 76,80 persen yang memiliki luas lantai perkapita lebih dari 10 m^2. Dengan kata lain, sebanyak 23,20 persen rumah penduduk memiliki luas hunian yang kurang layak.

Fasilitas Perumahan

Selain dilihat dari kondisi fisik bangunannya, kualitas perumahan juga ditentukan oleh fasilitas yang ada di dalamnya. Fasilitas perumahan penting untuk membuat suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati. Fasilitas pokok yang penting antara lain tersedianya listrik sebagai sumber penerangan utama, sistem pembuangan kotoran, dan air minum bersih.

Tabel 11. Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Halmahera Tengah, 2016

Indikator Kualitas Perumahan	2016
(1)	(2)
Listrik	90,32
Leher Angsa	96,78
Tangki Septik	82,31
Sumber Air Minum Bersih *)	59,75
Sumber Air Minum Layak **)	51,09

**) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m]*
***) Terdiri dari leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m]*
Sumber: BPS, Susenas

Sumber penerangan utama yang ideal bagi rumah tangga adalah listrik. Listrik dinilai lebih terang, praktis, dan modern serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pada tahun 2016, penduduk Halmahera Tengah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama sebesar 90,32 persen, sedangkan sisanya masih menggunakan lampu minyak dan tidak memasang instalasi listrik di rumahnya. Pasokan listrik di Halmahera Tengah berasal dari PLN, sedangkan khusus di Kecamatan Pulau Gebe, listrik didapat dari aliran listrik perusahaan tambang.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Suatu rumah dikatakan layak jika memiliki fasilitas sistem pembuangan kotoran manusia yang baik, yaitu jamban dengan bentuk leher angsa dan tersedianya tangki septik. Pada tahun 2016, rumah dengan jamban berbentuk leher angsa sebesar

96,78 persen. Sedangkan rumah dengan penampungan kotoran tangki septik sebesar 82,31 persen.

Air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air minum bersih yang terus-menerus diupayakan pemerintah. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Sumber air minum yang berasal dari air kemasan, isi ulang, dan leding masih dianggap yang lebih baik karena sifatnya yang higienis dibanding sumber lainnya. Berdasarkan tabel 11, rumah tangga dengan sumber air minum bersih sebesar 59,75 persen. Sedangkan rumah tangga dengan sumber air minum layak yaitu yang berasal dari leding, air hujan, sumur/ mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 meter dari penampungan tinja sebesar 51,09 persen. Masih rendahnya rumah tangga dengan sumber air minum yang layak perlu menjadi perhatian pemerintah karena jika dibiarkan dapat berpengaruh pada berkurangnya kesehatan penduduk terutama masalah pencernaan.

5
KEMISKINAN
Persentase
Penduduk Miskin
17,44%
2013
16,88%
15,23%
14,03%
2016
Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016
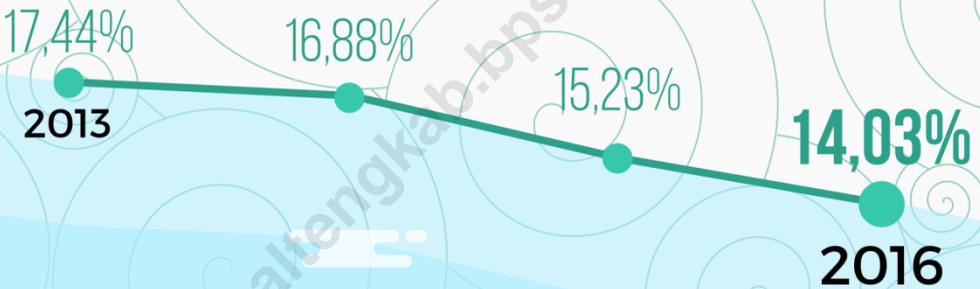
KEMISKINAN

Pada dasarnya, pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, yaitu tidak hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, yaitu persentase penduduk miskin (P_0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).

Perkembangan Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kemiskinan yang sebenarnya.

Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Tengah, 2012-2016
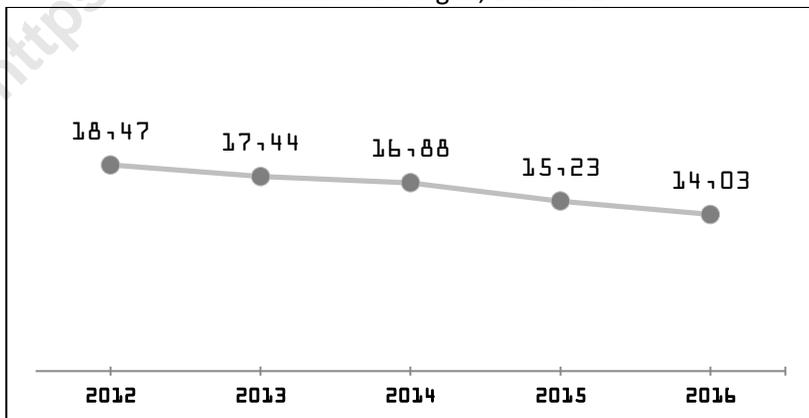
Sumber: BPS, Susenas

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016, presentase penduduk miskin sebesar 14,03 persen, lebih rendah dari tahun 2015 yaitu sebesar 15,23 persen. Hal ini selaras dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, presentase penduduk miskin Halmahera Tengah masih jauh lebih tinggi dibanding presentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 6,33 persen.

Gambar 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Tengah, 2012-2016
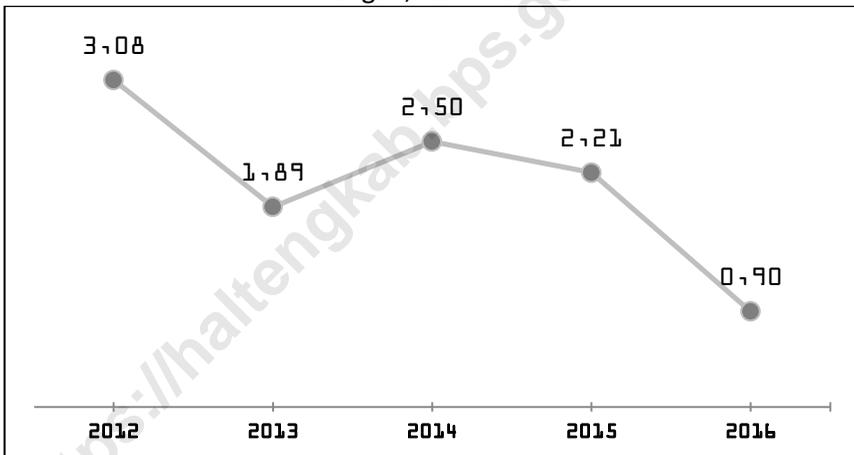
Sumber: BPS, Susenas

Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya dengan mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (Indeks kedalaman kemiskinan). Dari tahun 2008, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung mengalami penurunan, yaitu 5,58 pada tahun 2008 menjadi 0,9 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Tengah semakin mendekati garis kemiskinan. Artinya ada perbaikan secara

rata-rata pada standar hidup penduduk miskin mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, untuk analisis yang lebih mendalam dibutuhkan indikator lain untuk mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Berdasarkan gambar 8, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Halmahera Tengah juga cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu sebesar 1,54 menjadi 0,09 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Halmahera Tengah semakin berkurang.

Gambar 8. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Tengah, 2012-2016
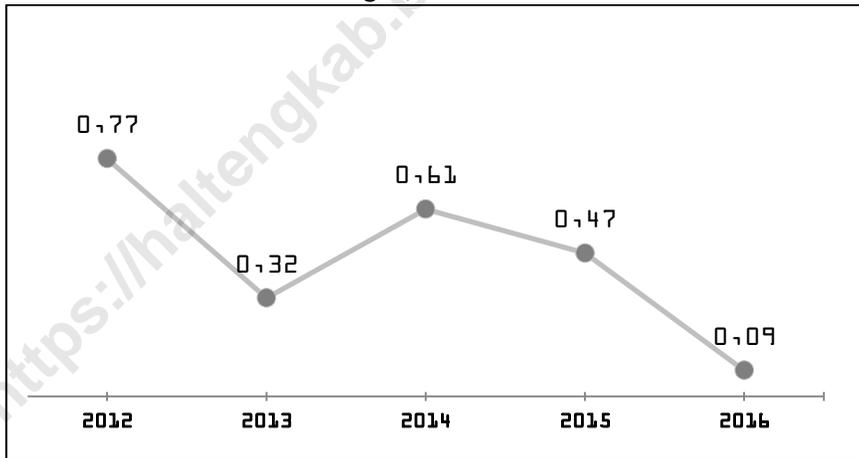
Sumber: BPS, Susenas

6 SOSIAL LAINNYA

Maksud utama bepergian

- 9,91% berziarah/ keagaman/ lainnya
- 12,06% Berlibur/ rekreasi
- 34,02% Profesi/ bisnis/ misi/ pertemuan/ kongres/ seminar/ pendidikan/ pelatihan
- 10,26% Kesehatan/ berobat/ olahraga/ kesenian
- 33,76% Mengunjungi teman/ keluarga

Penduduk yang Melakukan Kegiatan **Bepergian**

2016 ▷▷ 10,05%

Sumber: BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016

SOSIAL LAINNYA

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan perumahan masih ada indikator lainnya yang tidak termasuk dalam aspek-aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya persentase penduduk yang melakukan perjalanan, persentase penduduk yang menguasai media teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon, telepon seluler dan komputer, persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, serta persentase rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (raskin).

Perjalanan

Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (PP) sejauh minimal 100 kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah serta tidak dilakukan secara rutin. Umumnya, penduduk yang sering melakukan perjalanan (*mobile*) dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sebaliknya penduduk yang memiliki kemampuan ekonomi kurang dari cukup jarang melakukan perjalanan. Gambar 9 menunjukkan pada tahun 2016 presentase penduduk yang bepergian sebesar 10,05 persen. Sedangkan penduduk laki-laki memiliki presentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 12,04 persen jika dibandingkan dengan penduduk wanita yang hanya 7,97 persen.

Gambar 9. Persentase Penduduk yang Bepergian dalam 6 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2016

	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
Persentase	12,04	7,97	10,05
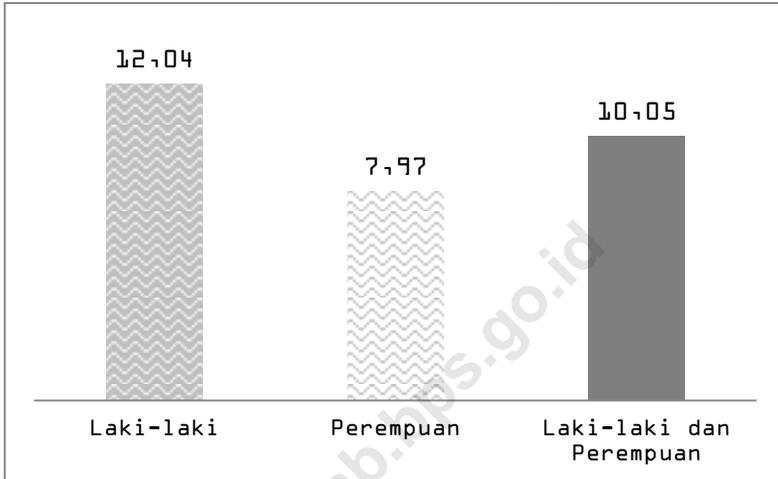
Sumber: BPS, Susenas

Tujuan utama penduduk melakukan perjalanan yaitu mengunjungi keluarga/teman. Selain itu, tujuan utama sebagian penduduk melakukan perjalanan adalah karena faktor kesehatan. Penduduk terutama di wilayah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan cukup serius lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit yang berada di dalam atau di luar Kabupaten Halmahera Tengah.

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat untuk semakin melek teknologi. Salah satu indikator untuk mengukurnya yaitu dengan melihat seberapa banyak penduduk yang mengakses internet. Semakin banyak masyarakat yang mengakses internet menunjukkan masyarakat yang semakin melek teknologi.

Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2015-2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	4,92	6,48	5,69
2016	8,72	6,26	7,51

Sumber: BPS, Susenas

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet dari 5,69 persen pada 2015 menjadi 7,51 persen. Peningkatan ini menunjukkan juga meningkatnya kesadaran penduduk Halmahera Tengah pada teknologi. Jika melihat jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih sering mengakses internet (8,72 persen) dibanding penduduk perempuan (6,26 persen) pada tahun 2016. Sedangkan tujuan utama penduduk dalam mengakses internet adalah untuk bermedia sosial yaitu sebesar 72,26 persen dan mendapat informasi/ berita sebesar 71,73 persen.

Gambar 10. Persentase penduduk menurut tujuan mengakses internet

Sumber: BPS, Susenas